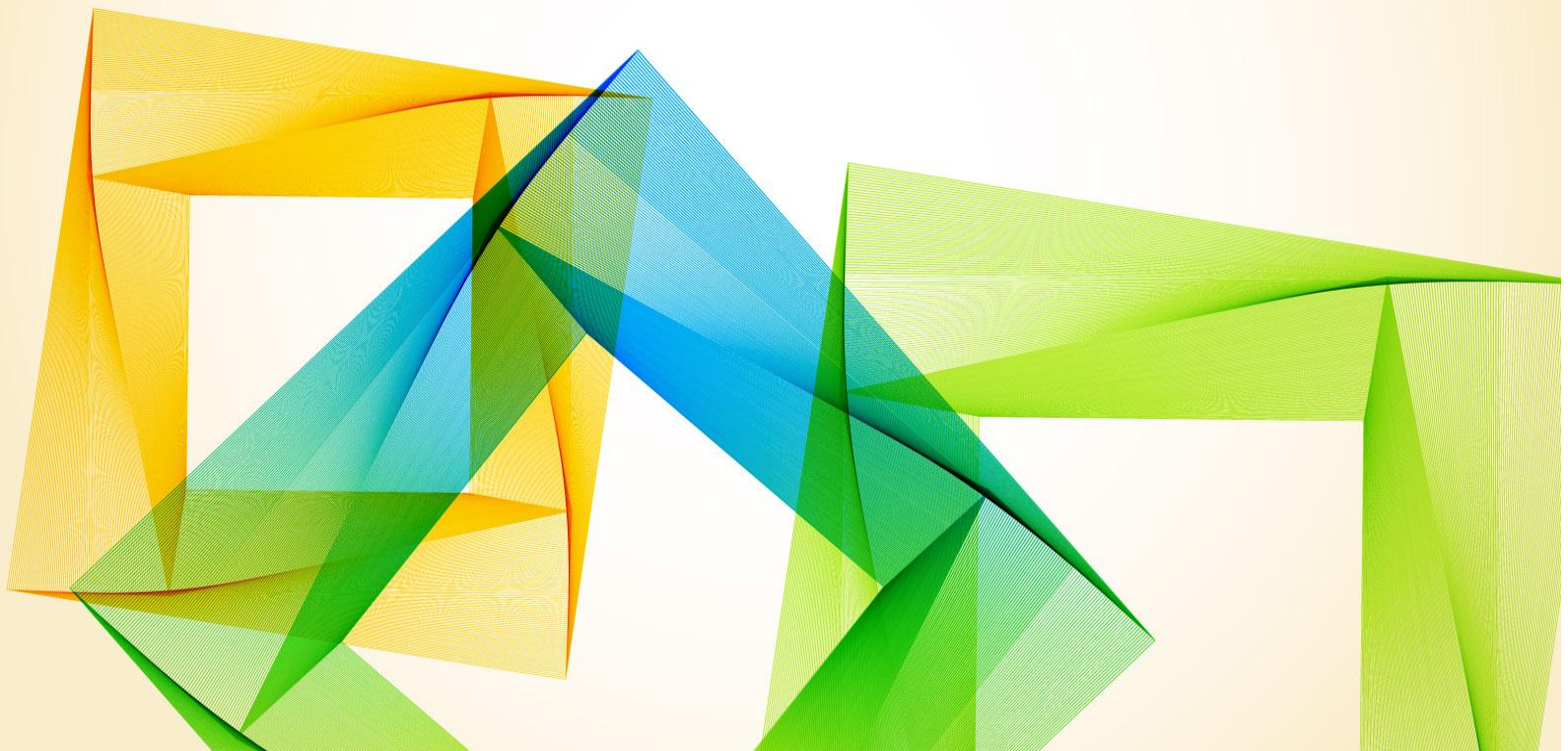




RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2017-2021



KATA PENGANTAR

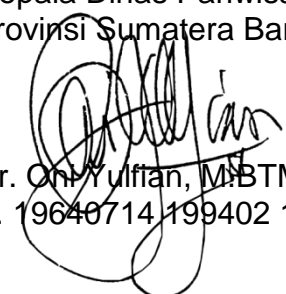
Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Beragam industri kreatif yang ada di Sumatera Barat seandainya bisa dikelola dengan baik, akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan mendatangkan kunjungan yang lebih banyak, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Perumusan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dibuat untuk Tahun 2017-2021 saja, tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya besar harapan kami penyusunan Renstra ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh aparatur dinas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

Padang, November 2017
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Sumatera Barat,


Ir. Ony Yulfan, M.BTM.
NIP. 19640714 199402 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB. II Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	38
BAB. III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pariwisata	43
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	43
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata	49
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	51
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	55

BAB. IV Tujuan dan Sasaran	57
BAB. V Strategi dan Arah Kebijakan.....	60
BAB. VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	64
BAB. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	66
BAB. VIII Penutup	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016, maka terjadi perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satunya melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 November 2016. Berdasarkan Perda tersebut, terjadi beberapa penyesuaian pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai pembagian kewenangan daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Adanya penyesuaian pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Sumatera Barat mengakibatkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021 belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk. Dengan demikian perlu dilakukan perubahan dokumen RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021 berikut perubahan dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran atas dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2021.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat Renstra Dispar Sumbar merupakan penyempurnaan dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. Sumatera Barat untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada RPJMD Prov. Sumatera Barat dan bersifat indikatif, selain itu Renstra ini juga berfungsi sebagai instrument dalam pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Dispar Sumbar Tahun 2017-2021 ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Prov. Sumbar mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah provinsi. Disamping itu, penyusunan Renstra Dispar Sumbar juga memperhatikan kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pariwisata sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Implementasi Renstra Dispar Sumbar ini selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dispar Sumbar yang menjadi pedoman penyusunan kegiatan Dispar Sumbar setiap tahunnya. Oleh sebab itu dokumen ini menjadi pedoman bagi segenap aparatur Dispar Sumbar mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya di bidang kepariwisataan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 ini didasarkan pada landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan landasan operasional sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang RIPKP Sumatera Barat Tahun 2014-2025;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016– 2021;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
28. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nomor 505/ /Dispar-Sekret/III-2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Tahun 2017-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 ini adalah agar tersusunnya rencana pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2017-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan yang memayunginya yakni: RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan perubahan rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 adalah :

- a. Sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan strategi dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh *stakeholder* kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pendukung kepariwisataan dan ekonomi kreatif terkait serta masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Sebagai penjabaran tentang kondisi umum kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat saat ini dan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan.
- c. Sebagai dasar pemahaman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan
Memuat latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra serta Sistematika Penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata
Bab ini memuat Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pariwisata, Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata.
- BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pariwisata
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan
Memuat rumusan pernyataanstrategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Memuat rencan aprogram dan kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Memuat indikator kinerja Dinas Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB. VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Dinas Pariwisata Prov. Sumbar

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata.

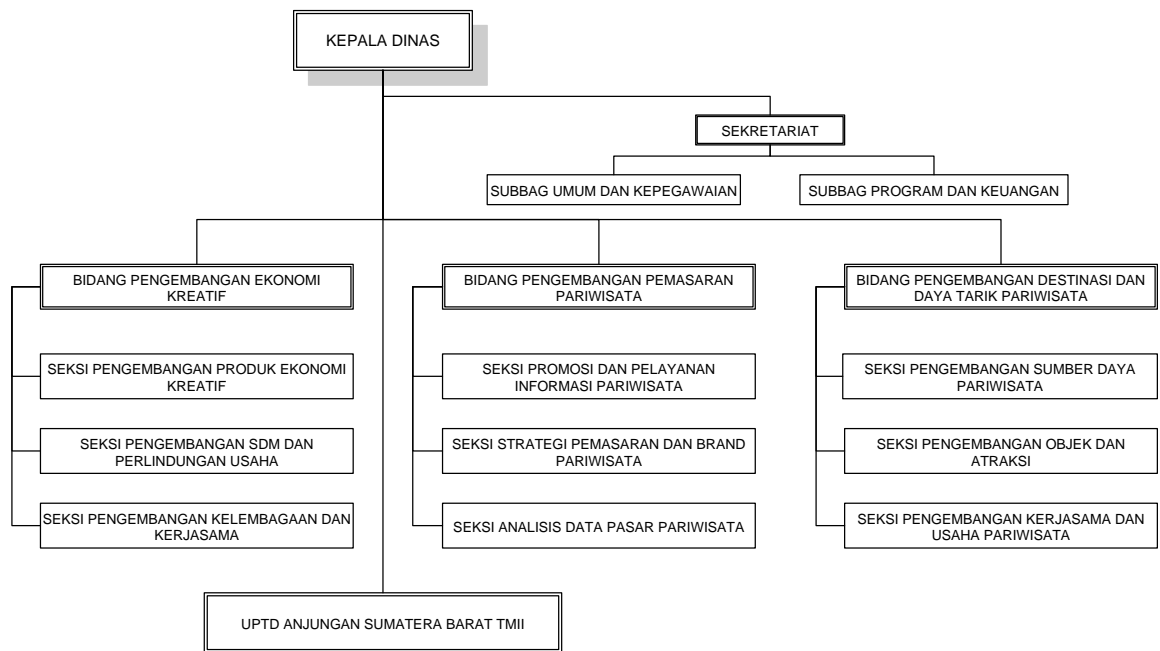
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan program/ kegiatan pembangunan Pariwisata, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dijabarkan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi yang

terdiri atas 1 (satu) orang eselon II, 5 (lima) orang eselon III, dan 14 (empat belas) orang eselon IV sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - d. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;

- e. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, ekonomi kreatif, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan pengembangan destinasi pariwisata;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pengembangan pemasaran pariwisata , pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi Kreatif;
- j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, perencanaan makro dan program/ kegiatan, monitoring dan evaluasi, laporan pertanggung jawaban dinas, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Sekretariat membawahi :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan organisasi, hubungan masyarakat, protokol serta urusan rumah tangga dinas.

b) Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi kinerja program, serta pengembangan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai skala prioritas, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata membawahi :

a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan sumber daya pariwisata.

b) Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi Pariwisata

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan objek dan atraksi pariwisata.

- c) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Usaha Pariwisata
Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan kerjasama dan usaha Pariwisata.

4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan sub sektor ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif membawahi :

- a) Seksi Pengembangan Produk Ekraf
Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan Produk sub sektor ekonomi kreatif.
- b) Seksi Pengembangan SDM dan Perlindungan Usaha
Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan SDM dan perlindungan usaha sub sektor ekonomi kreatif.
- c) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama
Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan kelembagaan dan kerjasama sub sektor ekonomi kreatif.

5. Bidang Pengembangan Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata membawahi :

- a) Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Pariwisata
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan promosi dan pelayanan informasi pariwisata.
- b) Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan strategi pemasaran dan brand pariwisata.
- c) Seksi Analisis Data Pasar Pariwisata
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan memberikan bimbingan teknis dan pembinaan analisis data pasar pariwisata.

6. UPTD Anjungan Sumatera Barat TMII

UPTD Anjungan Sumatera Barat TMII mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyelenggaraan Balai Anjungan Sumatera Barat, menyusun rencana Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata serta bahan promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Prov. Sumbar

Keberadaan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dapat diidentifikasi secara kualitas dan kuantitas. Jumlah pegawai di Dinas Pariwisata pada tahun 2018 adalah sebanyak 90 orang yang terdiri dari 66 orang bekerja di Kantor Dinas dan 24 orang bekerja di UPTD. Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.

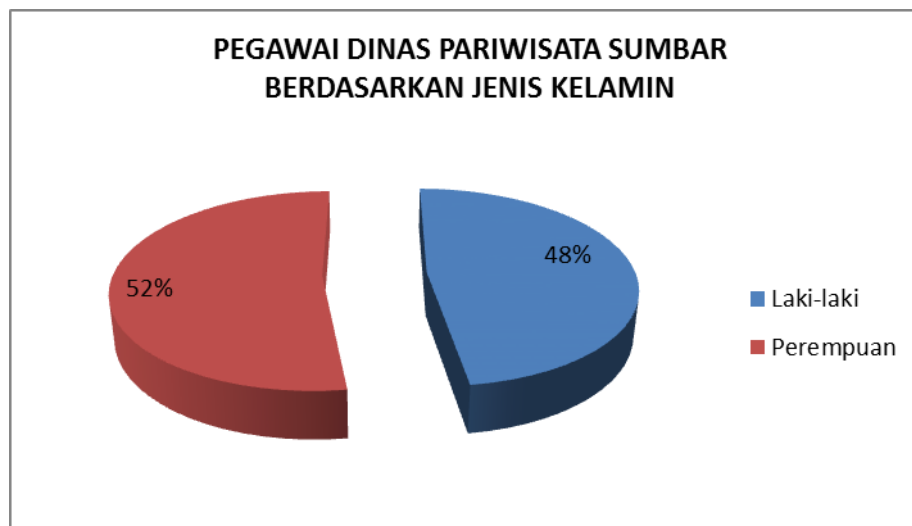
Dari 90 orang pegawai tersebut dapat diklasifikasi atas beberapa kriteria sebagai berikut :

a) Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.1
Distribusi Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	12	15	27
2	Bid. Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	4	10	14
3	Bid. Pengembangan Ekraf	6	6	12
4	Bid. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	9	4	13
5	UPTD. Anjungan Sumbar TMII	12	12	24
	Total	43	47	90

Gambar 1.2
Diagram Persentase Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar Berdasarkan Jenis Kelamin



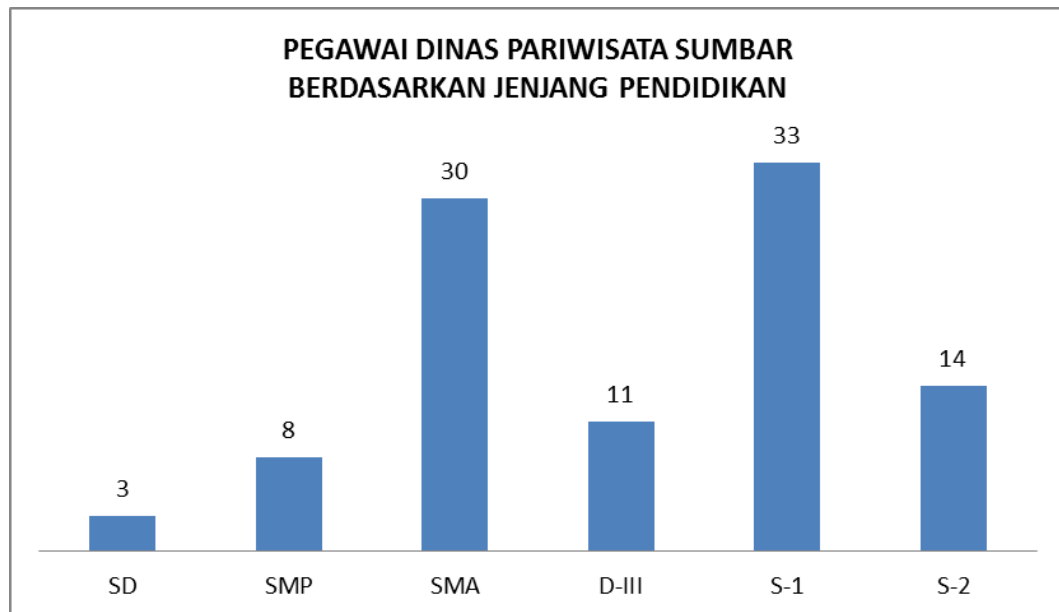
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa komposisi jumlah pegawai berjenis laki-laki dan perempuan pada Dinas Pariwisata sudah proporsional meskipun sebagian besar berjenis kelamin perempuan (52%). Begitu juga halnya dengan pendistribusian ke bidang-bidang dipandang sudah seimbang, kecuali untuk bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang komposisi pegawai laki-lakinya 2,5 : 1 dan Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata yang komposisi pegawai laki-lakinya 2 : 5. Hal ini harus disikapi dengan menelaah kembali kebutuhan pegawai pada masing-masing bidang berdasarkan jenis kelamin.

b) Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.2
Distribusi Pegawai Disparekraf Sumbar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bidang	Tk. Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	
1	Sekretariat	1	2	9	4	7	4	27
2	Bid. Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	0	1	1	1	7	4	14
3	Bid. Pengembangan Ekonomi Kreatif	0	1	4	1	4	2	12
4	Bid. Pengembangan Pemasaran Wisata	0	1	6	2	2	2	13
5	UPTD. Anjungan Sumbar TMII	2	2	7	2	10	1	24
	Total	3	7	27	10	30	13	90

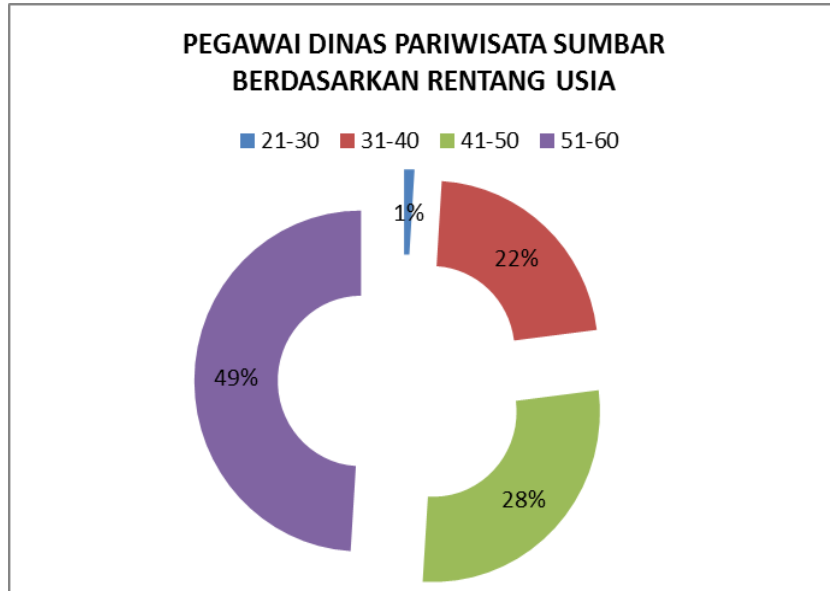
Gambar 1.3.
Diagram Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Pariwisata adalah berpendidikan S-1 31 orang (34%) dan diikuti dengan yang berpendidikan SMA 27 orang (30%). Sedangkan pegawai yang memiliki pendidikan S-2 berjumlah 12 orang (15%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh jumlah pegawai Dinas Pariwisata Sumbar memiliki tingkat pendidikan di bawah Strata 1 (52%). Dikemudian hari diharapkan lebih banyak lagi pegawai Dinas Pariwisata yang meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

c) Berdasarkan Rentang Usia :

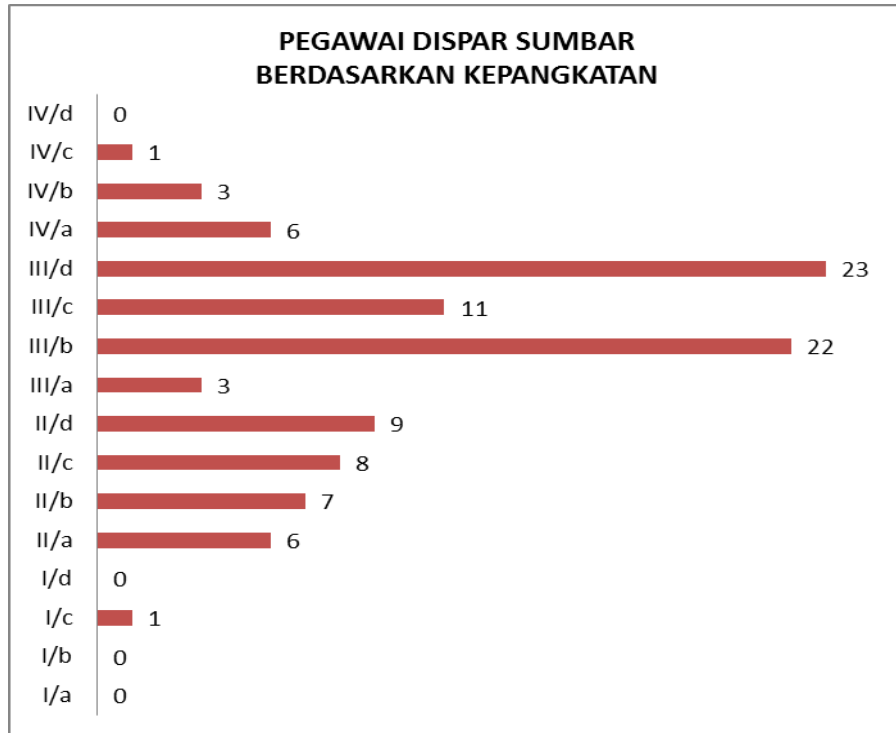
Gambar 1.4
Diagram Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar Berdasarkan Rentang Usia



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang akan memasuki usia 51 tahun keatas terbilang cukup banyak (49%) . Jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun pada tahun 2018 adalah 8 (delapan) orang. Dengan demikian Dinas Pariwisata harus memiliki langkah antisipatif dalam menghadapi sejumlah pegawai yang akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan.

d) Berdasarkan Golongan / Ruang :

Gambar 1.5
Diagram Pegawai Dinas Pariwisata Sumbar Berdasarkan
Kepangkatan



Sebanyak 22 orang dari keseluruhan jumlah pegawai Dinas Pariwisata Sumbar memiliki golongan/ruang III/b sedangkan jumlah pegawai yang memiliki gol. IV hanya berjumlah 10 orang. Hal yang demikian terjadi karena sebagian besar pegawai berpendidikan setara SMA sehingga gol./ruang maksimal yang dapat diperoleh adalah III/b. Sedangkan pegawai yang memiliki gol. IV merupakan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S-2 atau memiliki pendidikan S-1 tetapi menjabat pada posisi eselon III.

Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Sumbar yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Prov. Sumbar berupa bangunan, peralatan dan mesin, tanah serta aset tetap lainnya baik yang ada di dinas dan unit dinas sebagaimana terinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Prov. Sumbar

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan (Rp.)
				Persil	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	01		GOLONGAN TANAH			6.617.970.000
		01	Tanah	5	3.376	6.617.970.000
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			6.007.140.303
		02	Alat-alat Besar	-	2	33.450.000
		03	Alat-alat Angkutan	-	11	1.481.340.550
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	1	98.022.000
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	1.194	3.995.306.403
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	25	399.021.350
3	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			7.651.533.050
		11	Bangunan Gedung	11	2.975	5.005.001.170
		12	Monumen	4	1.109	2.646.531.880
4	05		GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA			615.946.510
		17	Buku Perpustakaan	-	1	1.456.500
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	-	151	614.490.010
5	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			49.500.000
		00	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	0	49.500.000
			JUMLAH			20.942.089.863

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar

Capaian kinerja hasil pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan agenda pengembangan kawasan wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan pemberdayaan serta peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain dan iptek dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel T-C.23

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah destinasi wisata yang berkembang		Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan pada tahun (n)		destinasi	1	-	-	-	-	4	-				4,00	-			
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan		Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang dan akomodasi lainnya pada tahun (n)		hari	-	1,20	1,21	1,22	1,23	-	1,35				-	1,13			

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (SB) yang meningkatkan pemberdayaannya (omzet/modal/tenaga kerja)		Jumlah pelaku ekraf SB yang mengalami peningkatan omset setelah diberdayakan dalam kegiatan (n)		pelaku	30	-	-	-	-	30	-				1,00	-			
4	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek (MDI) yang meningkatkan pemberdayaannya (omzet/modal/tenaga kerja)		Jumlah pelaku ekraf MDI yang mengalami peningkatan omset setelah diberdayakan dalam kegiatan (n)		pelaku	20	-	-	-	-	22	-				1,10	-			
5	Persentase pertumbuhan usaha pariwisata		$\frac{\text{jumlah usaha pariwisata (n)} - \text{jumlah usaha pariwisata (n-1)}}{\text{jumlah usaha pariwisata (n-1)}} \times 100\%$		%	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	1,62				-	0,81			
6	Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif		$\frac{\text{jumlah usaha ekonomi kreatif (n)} - \text{jumlah usaha ekonomi kreatif (n-1)}}{\text{jumlah usaha ekonomi kreatif (n-1)}} \times 100\%$		%	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	5,71				-	2,86			
7	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi)		$\frac{\text{jumlah wisatawan mancanegara (n)} - \text{jumlah wisatawan mancanegara (n-1)}}{\text{jumlah wisatawan mancanegara (n-1)}} \times 100\%$		%	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,54	13,3 4				1,01	1,78			
8	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus		$\frac{\text{jumlah wisatawan nusantara (n)} - \text{jumlah wisatawan nusantara (n-1)}}{\text{jumlah wisatawan nusantara (n-1)}} \times 100\%$		%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,30	6,00				1,06	1,20			

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi		Jumlah tenaga kerja pariwisata yang lulus mendapatkan sertifikat profesi		orang	50	50	30	200	105	0	-				0,00	-			
10	Jumlah SDM ekraf SB yang meningkat kompetensinya		Jumlah pelaku ekraf SB yang memiliki nilai post test lebih tinggi daripada pre test		orang	20	-	-	-	-	24	-				1,20	-			
11	Jumlah SDM ekraf MDI yang meningkat kompetensinya		Jumlah pelaku ekraf MDI yang memiliki nilai post test lebih tinggi daripada pre test		orang	20	-	-	-	-	26	-				1,30	-			
12	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja		Nilai LAKIP Dinas Pariwisata pada tahun (n-1)			-	B (70)	B (70)	BB(80)	BB(80)	-	B (63,20)				-	-			
13	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan		$\frac{\% \text{realisasi keuangan} + \% \text{realisasi fisik}}{2}$		%	-	100	100	100	100	-	93,39				-	0,93			

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Pada Indikator Kinerja masih dilaksanakan pada tahun 2017 hingga 2018, sedangkan tahun berikutnya terdapat perubahan cascading Dinas Pariwisata yang mempengaruhi indikator kinerja pada Dinas.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar hanya dapat diukur mulai tahun 2014 saja. Hal ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata Sumbar yang baru terjadi pada tahun 2014 sesuai Perda Prov. Sumbar No. 11 Tahun 2014. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Sumbar. Dari 8 indikator kinerja ini hanya 4 (empat) diantaranya yang dapat direalisasikan mulai tahun 2014, sedangkan untuk indikator kinerja yang berhubungan dengan peningkatan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi terhadap pelaku ekonomi kreatif, baik yang berbasis seni dan budaya maupun yang berbasis media, desain dan iptek baru dapat diukur pada tahun 2015.

Untuk rasio capaian kinerja pada tahun 2014 dan 2015 Dinas Pariwisata Sumbar tergolong baik karena memiliki kisaran realisasi rata-rata di atas 100%. Pada tahun 2014, dari 4 (empat) indikator kinerja yang dapat direalisasikan, 2 (dua) diantaranya berada dikisaran >100%, yaitu jumlah kawasan wisata alam dan budaya yang berkembang dapat direalisasikan sebanyak 8 (delapan) kawasan dari target 2 (dua) kawasan (400%), serta persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang dapat direalisasikan sebesar 7,03% dari target 5,00% (capaian realisasi sebesar 140,6%). Selain itu terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% yaitu untuk indikator jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi dengan target dan realisasi sebanyak 50 orang.

Pada tahun 2015, kedelapan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 136,92%. Terdapat 1 (satu) indikator yang capaian kinerjanya <100% yaitu jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi dengan target sebanyak 200 orang hanya dapat direalisasikan sebanyak 185 orang (92,5%). Hal ini disebabkan pada awal penetapan target Dinas Pariwisata direncanakan akan mendapatkan dana dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata terkait pengurusan sertifikasi profesi bagi tenaga kerja pariwisata. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dana tersebut tidak jadi diberikan akibat perubahan nomenklatur yang terjadi pada Kementerian Pariwisata.

Dari sisi penganggaran Dinas Pariwisata Sumbar mendapat dukungan dana APBD dalam melaksanakan kegiatan urusan pariwisata. Dukungan dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendistribusian anggaran pada masing-masing bidang dan UPTD yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat juga telah dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Penganggaran dari tahun 2013 s.d 2018 selalu meningkat, sedangkan pada tahun 2015 terjadi pengurangan karena anggaran pada urusan kebudayaan dipindahkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejalan dengan perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gambaran perkembangan anggaran dan realisasi pada Dinas Pariwisata Prov. Sumbar tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel T-C.24 berikut:

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	21.406.548.400	19.558.034.186	34.809.155.487	33.909.000.000		17.919.642.477	16.790.547.813				0,84	0,86				22,25	2,56
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.265.195.450	3.023.576.414	3.008.604.403	2.854.000.000		3.401.818.383	2.761.817.440				0,80	0,91				-11,58	14,53
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.860.000	32.260.000	34.760.000	35.000.000		25.958.626	27.654.469				0,79	0,86				2,20	8,51
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	356.550.000	501.750.000	539.600.000	400.000.000		314.281.666	323.148.136				0,88	0,64				7,47	-26,93
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	308.700.000					308.382.000					1,00					-33,33	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	140.654.000	124.272.700	185.785.800	185.000.000		139.085.400	123.432.200				0,99	0,99				12,48	0,44
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	139.843.800	180.023.750	173.651.500	172.000.000		134.340.950	178.499.250				0,96	0,99				8,08	3,21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	103.600.000	70.000.000	96.392.000	100.000.000		102.432.000	69.997.500				0,99	1,00				3,00	1,14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.518.655.000					888.954.000					0,59					-33,33	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	46.200.000	46.530.000	63.120.000	60.000.000		38.220.000	37.005.000				0,83	0,80			10,48	-3,87
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.765.000					27.590.000					0,35				-33,33	
Penyediaan Makanan dan Minuman	89.800.000	70.000.000	87.500.000	90.000.000		70.425.000	67.900.000				0,78	0,97			1,94	23,69
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dan Luar Daerah	894.054.000	1.150.090.000	708.105.685	872.000.000		816.641.666	1.101.675.323				0,91	0,96			4,45	4,87
Penyediaan Jasa Gedung Kantor/Rumah Dinas	40.000.000					40.000.000					1,00				-33,33	
Penyediaan Jasa Sopir Kantor	102.770.900					94.806.425					0,92				-33,33	
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	379.592.750					374.217.650					0,99				-33,33	
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	11.700.000	27.700.000	35.600.000	40.000.000		10.800.000	17.050.000				0,92	0,62			59,21	-33,32
Layanan Jasa Administrasi Kepegawaian	22.450.000					15.683.000					0,70				-33,33	
Penyediaan Jasa Kebersihan , Pengamanan dan Sopir Kantor		820.949.964	965.129.418	800.000.000			815.455.562					0,99			0,15	
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			109.450.000	100.000.000											-2,88	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.510.000												-33,33	

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.399.582.000	1.356.320.000	2.869.899.000	3.160.000.000		3.680.925.489	1.298.972.229				0,84	0,96			17,51	14,47
Pengadaan Meubeleu	161.100.000	87.500.000	52.000.000	55.000.000		115.199.000	69.968.500				0,72	0,80			-26,83	11,83
Pengadaan Komputer Dan Jaringan Komputerisasi	101.030.000					100.504.999					0,99				-33,33	
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi Dan Informasi	751.905.500			198.000.000		238.434.200					0,32				-33,33	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000	90.000.000	100.000.000	100.000.000		29.637.000	84.610.200				0,99	0,94			70,37	-4,84
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	116.000.000	170.200.000	1.231.000.000	125.000.000		95.277.720	155.642.856				0,82	0,91			193,38	11,34
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.630.000	114.450.000	119.070.000	120.000.000		71.535.000	109.068.023				0,90	0,95			16,18	6,08
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	134.766.000		193.224.000	150.000.000		126.010.200					0,94				-40,79	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3.025.150.500	200.000.000	399.355.000	400.000.000		2.904.327.370	197.512.400				0,96	0,99			2,15	2,86
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		654.170.000	445.500.000	450.000.000			642.170.250					0,98			-10,30	
Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas		40.000.000	40.000.000				40.000.000					1,00			-33,33	

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	415.147.600	362.351.000	598.592.000	604.300.000		391.493.600	352.866.000				0,94	0,97			17,81	3,27
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.723.800	71.951.000	80.000.000	80.000.000		62.476.000	71.247.000				0,88	0,99			4,31	12,09
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Skpd	69.323.800		96.392.000	98.000.000		58.817.600					0,85				-32,78	
Penatausahaan Keuangan SKPD	275.100.000	290.400.000	264.900.000	264.000.000		270.200.000	281.619.000				0,98	0,97			-1,19	-1,27
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD			50.000.000	55.000.000											3,33	
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan			107.300.000	107.300.000												
Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset		310.565.000					239.003.098					0,77			-33,33	
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		90.000.000					83.727.250					0,93			-33,33	
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD		220.565.000					155.275.848					0,70			-33,33	

Program Pengembangan Pemasaran Wisata	5.327.306.000	7.618.097.150	13.339.490.584	11.228.700.000		4.570.803.041	6.326.705.989				0,86	0,83			34,09	-3,21
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi di Anjungan Sumbar TMII	141.872.000	145.976.000				128.843.500	145.001.000				0,91	0,99			-32,37	9,38
Familiarization Trip	255.000.000	185.000.000	182.400.000	200.000.000		188.685.031	131.766.213				0,74	0,71			-6,40	-3,74
Penyelenggaraan Event Tour de Singkarak	2.802.671.000	4.120.000.000	7.957.282.200	7.800.000.000		2.699.197.124	3.681.171.588				0,96	0,89			46,05	-7,23
Penyusunan Data Kepariwisataaan Sumbar	100.000.000	115.000.000	183.934.550	200.000.000		79.670.000	88.558.000				0,80	0,77			27,89	-3,34
Promosi Pariwisata Sumatera Barat Di Tingkat Nasional Dan Internasional	976.263.000	667.173.150	1.051.902.050	895.700.000		584.698.860	506.569.403				0,60	0,76			3,72	26,78
Promosi Event Pariwisata Daerah	201.000.000	300.000.000				155.597.243	239.060.725				0,77	0,80			-16,92	2,94
Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata	690.500.000	1.231.500.000	1.187.111.300	750.000.000		631.243.783	1.040.178.710				0,91	0,84			12,64	-7,61
Gelar Pesona Sumbar	160.000.000					102.867.500					0,64				-33,33	
Tindak Lanjut Promosi Halal Tourism		693.448.000					438.212.350					0,63			-33,33	
Partisipasi Dukungan dan Promosi MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)		160.000.000					56.188.000					0,35			-33,33	
Peningkatan Kualitas Promosi Anjungan Sumbar TMII			117.508.000												-33,33	

Parade Seni Kreatif		239.370.000				237.164.000				0,99				-33,33	
Partisipasi pada Pagelaran Produk Kerajinan Minangkabau		567.277.000				479.578.500				0,85				-33,33	
Persiapan Pembentukan Zona Kreatif di Kabupaten/Kota		150.000.000				120.456.000				0,80				-33,33	
Gelar Karya Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya Tingkat Nasional		170.789.300				155.432.550				0,91				-33,33	
Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif		2.232.521.322	4.877.495.600	1.655.000.000		1.782.154.272				0,80				17,47	
Partisipasi Anjungan Sumatera Barat pada Event TMII (Taman Mini Indonesia Indah)		300.000.000	308.959.200			293.136.741				0,98				-32,34	
Paket Khusus TMII (Program Terpadu dengan Pengelola TMII)		150.000.000				149.574.000				1,00				-33,33	
Gelar Karya Produk Ekonomi Kreatif			3.055.677.700	1.035.000.000										-22,04	
Promosi Produk Ekonomi Kreatif pada Pameran Produk Kerajinan Sumatera Barat			561.021.000	700.000.000										8,26	
Pemetaan dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Kreatif			190.167.300											-33,33	
Penyelenggaraan Pemilihan Duta Wisata Nasional				500.000.000											

Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.089.380.200	1.145.153.000	3.091.587.050	2.658.000.000		1.239.688.610	1.040.473.581				0,59	0,91			36,92	53,13
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata	573.000.000	175.425.000	99.476.000	400.000.000		14.740.800	158.351.700				0,03	0,90			63,14	3408,85
Peningkatan Dan Pengembangan Gerakan Sadar Wisata	435.000.000	675.224.000	688.914.200	200.000.000		322.420.500	612.273.900				0,74	0,91			-4,57	22,34
Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pariwisata	211.662.000		1.434.546.100			194.814.100					0,92				-66,67	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Agrowisata/Ekowisata	399.996.000	80.132.000				371.344.060	65.921.300				0,93	0,82			-59,99	-11,39
Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekraf Berbasis Mdi	77.160.500					72.351.400					0,94				-33,33	
Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Dan Budaya	75.000.000					69.824.500					0,93				-33,33	
Achievement Motivation Trainning (AMT) Bagi Pelaku Usaha Ekraf	182.561.700		127.873.500	143.000.000		90.364.250					0,49				-29,39	
Workshop Desain Fashion Minangkabau	135.000.000					103.829.000					0,77				-33,33	
Peningkatan Kapasitas Perupa		111.748.000					103.669.000					0,93			-33,33	

Workshop Penciptaan Karakter Lokal		102.624.000				100.257.681				0,98				-33,33	
Sertifikasi Halal bagi Pelaku Industri Pariwisata			94.697.100	398.000.000										106,76	
Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga Pariwisata			352.877.000	350.000.000										-0,27	
Pemetaan Usaha Pariwisata			92.867.700											-33,33	
Workshop Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			200.335.450	600.000.000										66,50	
Peningkatan Kapasitas SDM (Pelaku Usaha dan Aparatur) Pariwisata				460.000.000											
Koordinasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif dengan Lembaga Lainnya				107.000.000											
Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	300.000.000	287.570.300	974.171.300	7.734.000.000		274.797.400	242.847.450			0,92	0,84			309,51	-7,81
Peduli Wisata Award	300.000.000					274.797.400				0,92				-33,33	
Penyusunan Buku Direktori Destinasi dan Daya Tarik Objek Pariwisata Sumatera Barat		187.570.300					157.451.050				0,84			-33,33	
Pengadaan Lahan Pengembangan Pariwisata		100.000.000					85.396.400				0,85			-33,33	

Penghargaan Pariwisata Sumatera Barat			265.165.000	1.200.000.000												117,52	
Pemetaan Potensi Geowisata Sumatera Barat			138.470.300													-33,33	
Finalisasi Ranperda Pariwisata Halal			182.412.000	200.000.000												3,21	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Sumatera Barat			388.124.000	1.584.000.000												102,71	
Penyiapan Usulan Geopark Ranah Minang				600.000.000												0,00	
Review Perda RIPKP				250.000.000												0,00	
Penyusunan Travel Pattern Pariwisata Sumatera Barat				500.000.000												0,00	
Penyusunan Amdal Kawasan Mandeh				1.400.000.000												0,00	
Penyediaan Lahan Pengembangan Pariwisata				1.600.000.000												0,00	
Penyusunan Izin Lingkungan Rest Area Ulu Aia				400.000.000												0,00	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar

Mengacu pada arah kebijakan yang tertuang pada Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, pemerintah pusat mengarahkan pembangunan pariwisata pada empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Dengan demikian, agar tercipta pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, khususnya di Sumatera Barat maka arah kebijakan pembangunan pariwisata di Sumatera Baratpun hendaknya sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan menjadi pilar pembangunan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia yang menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019 mendatang. Oleh karena itu pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi langkah percepatan terpenuhinya target tersebut (Tabel 2.6./Tabel T-IV.C.4).

Tabel 1.6
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Prov. Sumbar
terhadap
Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota*) dan Renstra
Kementerian Pariwisata

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dispar Sumbar	Sasaran pada Renstra Dinas Pariwisata Kab./Ko.	Sasaran pada Renstra Kementerian Pariwisata
1.	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Sumatera Barat	6	3	20
2.	Meningkatnya pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif	216 (pelaku ekraf SB) 137 (pelaku ekraf MDI)	-	-
3.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	45.00% (wisman) 30.00% (wisnus)	20%	20 juta orang wisman 275 juta (perjalanan wisnus)
4.	Meningkatnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat	485 orang (sertifikasi profesi) 130 (pelaku ekraf SB) 140 (pelaku ekraf MDI)	-	35.000 orang (sertifikasi profesi)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan kualitas

destinasi pariwisata dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan merupakan indikator kinerja yang menjadi sasaran baik pada tingkat kab./ko., provinsi hingga pemerintah pusat. Sedangkan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya pelaku ekonomi kreatif masih berda dalam tingkatan provinsi saja. Hal ini disebabkan karena belum semua dinas pariwisata di kabupaten/kota memasukkan unsur pengembangan ekonomi kreatif menjadi sasaran pembangunan pariwisata di daerah mereka masing-masing.

Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar dalam lima tahun ke depan, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah perlu dilakukan. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pariwisata. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pariwisata dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pariwisata dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pariwisata dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut (Tabel 2.7/ Tabel T-IV.C.6).

Tabel 1.7
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Disparekraf	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dispar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKW Painan	PKL Painan	Program Pengembangan Kawasan Pariwisata	Terbatasnya kewenangan Disparekraf dalam mengintervensi pembangunan fisik di objek wisata Kab./Ko.	Kawasan Mandeh

Pengembangan pariwisata Sumatera Barat pada dasarnya diarahkan pada setiap objek wisata unggulan yang berada di Kab./Ko. Akan tetapi dengan diusulkannya Kawasan Mandeh sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Nasional, ditunjang dengan penetapan Kawasan Mandeh sebagai Kawasan Wisata Bahari Terpadu oleh Presiden RI pada tahun 2015, maka pengembangan pariwisata Kawasan Mandeh menjadi salah satu prioritas pengembangan disamping objek-objek wisata lain yang berada di Kab./Ko. lainnya.

Untuk menyusun rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021, adalah sangat penting untuk meninjau lingkungan

internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan kondisi riil dari organisasi dari semua aspek untuk menentukan apa saja sisi lemah dan sisi kuat dinas dalam mengemban tugasnya membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Analisis selanjutnya adalah kondisi eksternal untuk dapat pula mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh dinas. Menggabungkan kondisi internal dan eksternal akan melahirkan strategi apa yang akan dipilih dalam membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat oleh Dinas.

Faktor Internal :

a) Kekuatan (*Strengths*) :

1. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya;
2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah;
3. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat.

b) Kelemahan (*Weaknesses*) :

1. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata;
3. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pemko.

Faktor Eksternal :

a) Peluang (*Opportunities*) :

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk berwisata;
2. Perkembangan teknologi yang semakin canggih;
3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

b) Ancaman (*Threats*) :

1. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Permasalahan pokok pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya meliputi beberapa aspek yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus dipecahkan untuk mendorong proses pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya identifikasi permasalahan di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dibatasi oleh kewenangan pemerintah Provinsi dalam		

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	mengembangkan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah Kab./Kota		
	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar belum didukung oleh kelembagaan dan sumber daya manusia yang kredibel dan kompeten		
	Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat		
	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat		

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, diketahui bahwa dalam memenuhi arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan

Nasional, masih terdapat beberapa kendala yang harus ditanggulangi, baik dari internal maupun eksternal Dinas Pariwisata Sumbar.

3.2. Telaahan Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi atas faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Terpilih Periode 2016-2021 telah menetapkan Visi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yakni **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**. Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif terletak pada Misi 4 yaitu “meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah”, yang salah satu tujuannya adalah menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya. Sedangkan sasaran yang dituju dari misi 4 ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Terkait dengan program prioritas pembangunan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar pada tabel 3.1., dipaparkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 4 : meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah			
	Program : Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dibatasi oleh kewenangan pemerintah Provinsi dalam mengembangkan objek wisata yang menjadi	1. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./ Pemko; 2. Pengembangan destinasi wisata di Kab./Ko belum memiliki arah yang jelas	1. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah pada pemerintah provinsi; 2. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan

		kewenangan pemerintah Kab./Kota		Sumatera Barat
	Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar belum didukung oleh kelembagaan dan sumber daya manusia yang kredibel dan kompeten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan pariwisata Sumbar; 2. Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kredibel dan kompeten belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya perhatian pemerintah baik pusat maupun provinsi dalam mengembangkan SDM pariwisata dan ekraf; 2. Tersedianya program dan kegiatan pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekraf
	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya daya saing pelaku ekraf Sumbar; 2. Terbatasnya pangsa pasar produk ekraf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya peluang pasar produk ekraf Sumbar serta peluang kerjasama dengan negara lain sejak diberlakukannya MEA
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kreatifitas aparatur dalam menciptakan event promosi pariwisata daerah tingkat nasional; 2. Terbatasnya jadwal penerbangan internasional di BIM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata daerah; 2. Terjalannya hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara tetangga dalam rangka ekspansi jalur penerbangan dari dan ke Sumbar melalui BIM

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Sumatera Barat, yaitu :

1. Faktor Penghambat :

- Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./ Pemko;
- Pengembangan destinasi wisata di Kab./Ko belum memiliki arah yang jelas;
- Kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan pariwisata Sumbar;
- Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kredibel dan kompeten belum memadai;
- Rendahnya daya saing pelaku ekraf Sumbar;
- Terbatasnya pangsa pasar produk ekraf;
- Kurangnya kreatifitas aparaturnya dalam menciptakan event promosi pariwisata daerah tingkat nasional;
- Terbatasnya jadwal penerbangan internasional di BIM.

2. Faktor Pendorong :

- Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah pada pemerintah provinsi;
- Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat;
- Tingginya perhatian pemerintah baik pusat maupun provinsi dalam mengembangkan SDM pariwisata dan ekraf;
- Tersedianya program dan kegiatan pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekraf;
- Terbukanya peluang pasar produk ekraf Sumbar serta peluang kerjasama dengan negara lain sejak diberlakukannya MEA;
- Semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata daerah;

- Terjalannya hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara tetangga dalam rangka ekspansi jalur penerbangan dari dan ke Sumbar melalui BIM.

3.3. Telaahaan Renstra K/L

Renstra Kementerian pariwisata ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019. Di dalamnya tertuang Visi Kementerian Pariwisata yang menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni : **“Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional sehingga Bangsa Indonesia Dapat Maju dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya”**.

Berdasarkan visi Kementrian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementrian Pariwisata 2015-2019 adalah :

- 1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
- 2) Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- 3) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan

nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan

- 4) Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015–2019. Sejalan dengan substansi renstra Kementerian tersebut, Dinas Pariwisata memiliki beberapa permasalahan terkait pencapaian sasaran strategis Kementerian Pariwisata seperti terlihat pada tabel 3.3 (Tabel.T-IV.C.12) di bawah ini :

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pariwisata	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian kunjungan wisman dan wisnus nasional	1. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai; 2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek	1. Tersedianya potensi daya tarik wisata; 2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah; 3. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat
2	Meningkatnya investasi di sektor pariwisata			
3	Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional			
4	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional			
5	Meningkatnya jumlah			

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pariwisata	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)		wisata;	4. Ditetapkannya Kawasan Mandeh sebagai Kawasan Wisata Bahari Terpadu oleh Presiden RI
6	Meningkatnya jumlah penerimaan devisa		3. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pemko	
7	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)			
8	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara			
9	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa isu yang memberikan dampak negatif bagi pembangunan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 antara lain; perubahan penutupan hutan, ancaman keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan ancaman bencana lingkungan seperti banjir, longsor dan abrasi. Hal tersebut erat kaitannya dengan kekuatan objek pariwisata di Sumatera Barat yang masih di dominasi oleh objek wisata alam yang sangat tergantung pada kondisi alamiah *landscape* untuk dinikmati para wisatawan dengan pemahaman bahwa yang ingin dinikmati wisatawan adalah kondisi ekologi yang alami dan stabil sehingga membawa kesan khusus bagi wisatawan yang mengunjungi objek tersebut.

Beberapa isu yang memberikan dampak positif bagi pembangunan bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat antara lain; peningkatan taraf hidup, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peluang kerja. Hal ini juga erat kaitannya dengan interaksi pelaku usaha bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dukungan masyarakat di sekitar objek wisata dalam

hal penyediaan jasa dan usaha terkait. Pada beberapa destinasi dan objek khusus interaksi ini sudah membuahkan hasil yang menggembirakan dengan tumbuhnya usaha-usaha pariwisata seperti hotel, *homestay*, rumah makan, restoran, pedagang cendera mata dan fasilitasi kegiatan-kegiatan pariwisata lain seperti panjat tebing, *outbond*, arung jeram dan lain sebagainya (Tabel 3.4.)

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar berdasarkan
Telaahan RTRW
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dispar Sumbar	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebijakan terkait untuk pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara-selatan Provinsi Sumatera Barat	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dibatasi oleh kewenangan pemerintah Provinsi dalam mengembangkan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah Kab./Kota	1. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata di kab./ko.; 2. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pemko dalam mengembangkan objek wisata di daerahnya	1. Tersedianya potensi daya tarik wisata; 2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah; 3. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat
2	Kebijakan pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah			
3	Kebijakan penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah			
4	Kebijakan penetapan kawasan lindung dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan Provinsi berbatasan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan rencana antara lain; pemantapan fungsi kawasan lindung, prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang			

	berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan Provinsi yang berbatasan			
5	Kebijakan peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan rencana pemanfaatan kawasan budidaya khususnya di bidang kebudayaan dan kepariwisataan sesuai kapasitas dan daya dukung lingkungan			

Di samping telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sumbar, dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Sumbar Tahun 2017-2021 ini juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Telaahan terhadap KLHS Sumbar ini berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Dinas Pariwisata Tahun 2017-2021 (Tabel 3.5.).

Tabel 3.5.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Sumbar berdasarkan Analisis
KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dispar Sumbar	Permasalahan Pelayanan Dispar Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penggunaan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik pada destinasi pariwisata	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Sarana dan prasarana	1. Tersedianya alokasi anggaran

2	Pengaturan kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata melalui sistem sirkulasi	di Sumatera Barat dibatasi oleh kewenangan pemerintah Provinsi dalam mengembangkan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah Kab./Kota	yang ada di objek wisata belum memenuhi standar destinasi wisata yang berwawasan lingkungan; 2. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pemko dalam mengembangkan objek wisata di daerahnya; 3. Kurangnya wawasan masyarakat dalam mengelola objek wisata yang ramah lingkungan	pembangunan pariwisata daerah; 2. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat
3	Pembangunan destinasi pariwisata sesuai peruntukkan lahannya			

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam mengembangkan pariwisata Sumatera Barat harus memperhatikan aspek kajian lingkungan atas objek wisata yang dikembangkan. Aspek kajian lingkungan yang dimaksud adalah bahwa dalam pengembangan objek wisata harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki dan mengoperasikan unit pengolahan limbah cair;
2. Menerapkan konsep pemisahan, daur ulang (*recycle*), *composting*, penggunaan kembali (*reuse*), dengan mengembalikan unsur penyusunnya kembali (*recovery*);
3. Menjaga dan mengembangkan ragam flora dan fauna;
4. Mempunyai sistem pengolahan limbah bahan beracun berbahaya (B3) dengan baik;

5. Melakukan upaya-upaya nyata dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan (air, tanah, udara) di dalam dan di luar lingkungan perusahaan;
6. Menghemat pemanfaatan sumber daya air;
7. Menghemat pemanfaatan sumber daya lahan;
8. Menghemat pemanfaatan sumber daya energi;
9. Dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mutu lingkungan secara berkala;
11. Tidak terjadi konflik dengan masyarakat karena faktor lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat; visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Guber Terpilih Sumatera Barat, sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar dan identifikasi permasalahan tersebut di atas. Selanjutnya, sebelum menentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani oleh Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat pada periode empat tahun mendatang (2017-2021).

Adapun isu-isu strategis dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai;
2. *Mapping* destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana prasarana dimiliki) yang hasil akhirnya adalah penyusunan pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata belanja,

wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata;

3. Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum menyatu
Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (1) pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.
4. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan ekonomi kreatif dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Keterbatasan dana dan fokus kabupaten/kota dalam mengembangkan objek-objek wisatanya menjadi objek wisata berkualitas atau sebuah kawasan wisata yang dikelola dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hak yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata.**

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat tahun 2017-2021 adalah:

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Sumatera Barat
2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan;
3. Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat;
4. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat terlihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata.	Jumlah PAD sektor Pariwisata	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,20 hari	1,21 hari	1,22 hari	1,23 hari	1,24 hari
			Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pariwisata Sumatera Barat	Persentase pertumbuhan usaha pariwisata	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
				Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
			Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi)	7,50 %	7,50 %	7,50 %	7,50 %	7,50 %
				Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
			Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	A
				Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat sebagai Destinasi Pariwisata Berbasis Agama dan Budaya yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
Misi 1 : Mengembangkan destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata.	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada objek wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan amenities dan aksesibilitas objek wisata 2. Penyediaan lahan untuk pengembangan pariwisata 3. Peningkatan atraksi pada objek wisata 4. Penerapan sistem <i>burden sharing</i> dengan pemkab./pemko dalam mengembangkan objek wisata 5. Memberikan apresiasi terhadap kab./ko. terkait pembangunan pariwisata

Misi 2 : Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat mendorong sektor pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pariwisata Sumatera Barat	Meningkatkan peran serta pelaku ekonomi kreatif (ekraf)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan pelaku ekraf pada event pariwisata 2. Penyelenggaraan event ekraf tahunan 3. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku ekraf
Misi 3 : Mengembangkan pemasaran pariwisata Sumatera Barat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Meningkatkan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan event pariwisata tahunan 2. Peningkatan intensitas promosi bersama (<i>joint promotion</i>) dengan kab./ko. 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi pariwisata 4. Penciptaan <i>branding</i> pariwisata Sumatera Barat

Misi 4 : Mengembangkan usaha pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Mengembangkan usaha pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi sertifikasi profesi bagi SDM pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata 2. Penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku ekraf 3. Penyelenggaraan kompetisi bagi pelaku ekraf 4. Peningkatan perilaku sadar wisata dan sapta pesona

Rencana pengembangan kawasan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat (RIPKP) Tahun 2014-2025 dibagi atas lima wilayah pembangunan pariwisata sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Wilayah Pengembangan Pariwisata

No.	Wilayah Pengembangan	Kabupaten/Kota
1	Wilayah I Padang dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan yang dikembangkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. KUPP Kota Padang (Kawasan Wisata Terpadu Kota Padang) b. KSPP Kabupaten Pesisir Selatan (Kawasan Wisata Mandeh). 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. KSPP Kabupaten Padang Pariaman (Kawasan Wisata Pantai Tiram) b. KPPP Kota Pariaman (Kawasan Pantai Gondorih, Pulau Angso Duo)

No.	Wilayah Pengembangan	Kabupaten/Kota
2	Wilayah II Bukittinggi dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan sebagai berikut: a. KUPP Bukittinggi (Kawasan Jam Gadang Pasar Atas, Bukittinggi sebagai Kota Pusaka dan Geopark) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kabupaten Agam (Kawasan Maninjau) b. KSPP Kabupaten Lima Puluh Kota (Kawasan Harau) c. KPPP Kabupaten Pasaman (Kawasan Equator) d. KPPP Kabupaten Pasaman Barat (Kawasan Pulau Panjang) e. KPPP Kota Payakumbuh (Kawasan Ngalau Indah)
3	Wilayah III Tanah Datar dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan sebagai berikut: a. KUPP Kabupaten Tanah Datar (Istano Basa Pagaruyung sebagai Kawasan Wisata Budaya) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kota Padang Panjang (Bukit Tui sebagai Kawasan Berkuda) b. KSPP Kabupaten Solok (Wisata Danau Singkarak dan Danau Kembar) c. KPPP Kota Solok (Kawasan Wisata Pulau Belibis) d. KPPP Kabupaten Solok Selatan (Kawasan Wisata Budaya 1000 Rumah Gadang)
4	Wilayah IV Sawahlunto dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan : a. KUPP Sawahlunto (Wisata Tambang di Kawasan Wisata Kota Tua) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kabupaten Sijunjung (Kawasan Silokek) b. KSPP Dharmasraya (Kawasan Wisata Sejarah Candi Padang Roco)
5	Wilayah V Kepulauan Mentawai dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan : a. KUPP Dusun Jati dan Dusun Mapadegat 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Teluk Katurai b. KSPP Katiet c. KSPP Tua Pejat d. KPPP Desa Silabu

Keterangan :

KUPP : Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata

KSPP : Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata

KPPP : Kawasan Potensial Pengembangan Pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah-langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan beserta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sesuai Program RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 didukung oleh 9 (sembilan) program pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) program belanja langsung pokok dan 4 (empat) program urusan pariwisata dengan rincian sebagai berikut :

a. **Belanja Langsung Pokok :**

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan secara administratif terhadap urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan organisasi, Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat melalui kegiatan-kegiatan pokok.

2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap sarana dan prasarana pendukung organisasi, humas, protokol serta rumah tangga Dinas melalui beberapa kegiatan pokok.

3) **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini ditujukan untuk peningkatan Disiplin Aparatur dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari melalui kegiatan pokok.

4) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini ditujukan untuk peningkatan Disiplin Aparatur dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari melalui kegiatan pokok.

5) **Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**

Program ini ditujukan untuk mengoptimalkan penatausahaan keuangan dengan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel melalui

kegiatan pokok.

b. Urusan Pariwisata :

1) Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata

Program ini ditujukan untuk mendorong terwujudnya pengembangan sarana dan fasilitas di kawasan wisata yang representatif bagi kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

2) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat.

3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Sumatera Barat melalui berbagai upaya pemasaran dan promosi terpadu, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri, untuk memantapkan posisi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata, dan untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan pariwisata nusantara.

4) Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini ditujukan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata dan ekonomi kreatif agar lebih kredibel dan berdaya saing.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C.27 (Terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja harus dimaknai sebagai perwujudan dari program Dinas Pariwisata yang merupakan bagian dari pencapaian program dan kegiatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Prov. Sumbar.

Berdasarkan hasil identifikasi indikator kinerja yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Sumbar Tahun 2016-2021, maka indikator kinerja Dinas Pariwisata Prov. Sumbar telah sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD Prov. Sumbar. Dalam identifikasi tersebut ditetapkan 2 (dua) indikator sebagaimana telah dibahas pada penjelasan sebelumnya.

Secara rinci indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Prov. Sumbar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016-2021

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi)	78.274 org	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	45.00%

	dan pintu kedatangan domestik)								
2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus	6.973.678 org	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	30.00%

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016-2021, Dinas Pariwisata telah menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yaitu persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi dan pintu kedatangan domestik) dan persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus.

Jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi dan pintu kedatangan domestik) ditargetkan meningkat sebesar 45.00% selama 5 tahun dengan persentase kenaikan 7,50% setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisnus lima tahun mendatang ditargetkan meningkat sebesar 30.00% dengan persentase kenaikan 5.00% setiap tahunnya.

Pencapaian target dari indikator ini diharapkan dapat menunjang pencapaian target nasional, yaitu target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta wisman dan 275 juta perjalanan wisatawan nusantara.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab atas amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Beragam industri kreatif yang ada di Sumatera Barat seandainya bisa dikelola dengan baik, akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan mendatangkan kunjungan yang lebih banyak baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara .

Perumusan Rencana Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dibuat untuk tahun 2017-2021 saja tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun berikutnya.

T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata
Provinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-												Unit Penanggung Jawab	Lokasi						
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD									
								K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)								
1	2	3	4				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2	4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100 %	100	4,229	100	3,009	100	2,854	100	3,095	100	5,346	100	5,346	Sekretariat	Sumatera Barat			
								Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan	%	100 %	100		100		100		100		100		100				100		100
							1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bln		12	30	12	35	12	35	12	38	12	41	12			41		
							2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln		12	447	12	540	12	400	12	434	12	449	12			449		
							3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	bln		12	320	12	186	12	185	12	201	12	610	12			610		
							4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	bln		12	348	12	174	12	172	12	187	12	618	12			618		
							5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bln		12	170	12	96	12	100	12	108	12	133	12			133		
							6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bln		12	42.24		63.12		60		65		59				59		
							7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	bln		12	70	12	88	12	90	12	98	12	115	12			115		
							8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar	bln		12	1727	12	708	12	872	12	946	12	1,888	12			1,888		
							9	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tersedianya Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	bln		12	24	12	36	12	40	12	43	12	31	12			31		
							10	Penyediaan jasa kebersihan, pengaman, sopir Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	bln		12	1050	12	965	12	800	12	868	12	1,210	12			1,210		
							11	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	bln		-	-	12	109	12	100	12	108	12	86	12			86		
					12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya kebutuhan pokok harian rumah tangga	bln		-	-	12	10	12	-	0	-	12	106	12	106						
			2	4	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana	%	100%	100	4,375	100	2,870	100	1,658	100	3,264	100	5,778	100	5,778					
					1	Pengadaan Meubelur	Tersedianya Meubelur	unit		18	36	100	52	100	55	100	60	100	153	100	153						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-												Unit Penanggung Jawab	Lokasi	
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
								K	Rp (jt)	K	Rp (jt)	K	Rp (jt)	K	Rp (jt)	K	Rp (jt)	K	Rp (jt)			
1	2	3	4	5	6	7	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21	
				2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit		6	889	100	446	100	450	100	488	100	1500	100	1500		
				3	Penyediaan Sewa Gedung kantor/ Rumah Dinas	Tersewanya rumah dinas jabatan	thn		1	42	1	40	-	-	-	-						
				4	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	unit		-	-	-	-	3	198	3	215	-	-	-	-		
				5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bln		12	58	12	100	12	100	12	108	12	77	100	77		
				6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	bln		12	119	12	1,231	12	125	12	135	12	158	100	158		
				7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln		12	55	12	119	12	120	12	130	12	73	100	73		
				8	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset	bln		-	-	12	193	12	150	12	163	12	175	12	175		
				9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	unit		1	3,176	1	399	1	400	1	434	1	3,642	1	3,642		
				10	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	unit		-	-	-	-	-	-	1	978	-	-	-	-		
				11	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	unit		-	-	-	-	-	-	1	488	-	-	-	-		
				12	Pengadaan Peralatan/perengkapan rumah jabatan/dinas/mors	Tersedianya peralatan/perengkapan rumah jabatan/dinas/mors	unit		-	-	1	39	-	-	-	-	-	-	-	-		
				13	Pengadaan instalasi dan jaringan	Tersedianya instalasi dan jaringan	paket		-	-	1	55	1	60	1	65	-	-	-	-		
				14	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	unit		-	-	1	196	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2 4 1 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam pemakaian dinas	%	98 stel	98	56	100	57	100	100	100	65	100	81	100	81			
				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	stel		98	56	100	57	98	60	98	65	98	81	98	81		
			2 4 1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	%	100%	100	139	100	147	100	170	100	184	100	186	100	186			
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	%		100	69	100	74	100	85	100	92	100	93	100	93		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-												Unit Penanggung Jawab	Lokasi				
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD							
								K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)						
1	2	3	4				5	6	7	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21	
				2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terikutinya sosialisasi peraturan perundang-undangan	%		-	-	100	74	100	85	100	92	100	93	100	93					
			2	4	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100%	100	360	100	599	100	604	100	818	100	571	100	571			
					1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Evaluasi dan Capaian Kinerja SKPD	dokumen		4	76	4	80	4	80	4	249	4	95	4	95				
					2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	dokumen		-	-	5	96	5	98	5	106	5	110	5	110				
					3	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa keuangan, sewa	bln		12	284	12	265	12	264	12	286	12	240	12	240				
					4	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	Terlaksananya monev pelaksanaan kegiatan SKPD	thn		-	-	1	50	1	55	1	60	1	66	1	66				
					5	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan	Tersedianya laporan keuangan SKPD	dokumen		-	-	2	107	2	107	2	116	2	60	2	60				
			2	4	1	7	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset	Tingkat kesesuaian Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset	%		100	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	thn		1	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	bln		12	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara (lewat pintu imigrasi)	2	4	1	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara		78.274	org	7.5	5,670	7.5	13,222	7.5	11,229	7.5	12,176	7.5	11,972	7.5	11,972	Bidang Pemasaran Pariwisata		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-												Unit Penanggung Jawab	Lokasi
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
								K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)		
1	2	3	4	5	6	7	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus			Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara		6.973.678 org	5		5		5		5		5		5			
				1	Peningkatan Kualitas Promosi Anjungan Sumbar TMII				131		-		-		-		-		-		-
				2	Familiarization Trip	orang		15	268	32	182.4	15	200	15	317	15	280	15	280		
				3	Penyelenggaraan Event Tour de Singkarak	event		1	2,800	1	7,957	1	7,800	1	7,458	1	7,458	1	7,458		
				4	Penyusunan Data Kepariwisataaan Sumbar	dokumen		1	105	1	184	1	200	1	417	1	300	1	300		
				5	Promosi Pariwisata Sumatera Barat di tingkat Nasional dan internasional	event		5	652	5	1,052	5	896	5	1,271	5	900	5	900		
				6	Promosi Event Pariwisata Daerah	festival		1	221		-		-		-		-		-		-
				7	Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata	media promosi		5	683	5	1,187	5	750	5	813	5	450	5	450		
				8	Tindak Lanjut Promosi Halal Tourism	orang		335	650		-		-		-		-		-		-
				9	Partisipasi Dukungan dan Promosi MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)	event		2	160		-		-		-		-		-		-
				10	Pemanfaatan Media dan Teknologi dalam Pemasaran Pariwisata	media		-	-	3	136	1	333	1	361	1	584	1	584		
				11	West Sumatera Travel Mart	kali		-	-	1	493.5	-	-	1	442	1	1300	1	1300		
				12	Pengembangan Strategi Brand Pariwisata Sumatera Barat	kegiatan		-	-	1	215	-	-	-	-	1	150	1	150		
				13	Promosi Pariwisata Sumatera Barat pada Hari Pers Nasional	kegiatan		-	-	1	1,815	-	-	-	-	-	-	-	-		
				14	Lomba Foto dan Video Pariwisata Sumatera Barat	kali		-	-		-	1	350	1	380	1	350	1	350		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-												Unit Penanggung Jawab	Lokasi	
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
								K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)			
1	2	3	4	5	6	7	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21	
				15	Penyelenggaraan Event Kepariwisataaan Sumatera Barat	Terseleenggaranya event pariwisata Sumatera Barat	kali		-	-	-	1	200	1	217	1	200	1	200			
				16	Minang Geopark Run	Terlaksananya kegiatan Minang Geopark Run	kali								1	500						
	Meningkatnya pertumbuhan industri Sumatera Barat	Persentase pertumbuhan usaha pariwisata	2	4	1	20	Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan usaha pariwisata	2	2,287	2	3,092	2	2,558	2	2,882	2	4,117	2	4,117	Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata dan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	
		Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif					1	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Pariwisata	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Pariwisata	orang	50	1532	30	99	30	400	65	500	70	330	70	330
							2	Peningkatan dan pengembangan Gerakan sadar wisata	Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan Gerakan sadar wisata	orang	240	435	450	689	450	200	255	300	260	490	260	490
							3	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pariwisata	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pariwisata	orang	-	-	650	1,435	-	-	-	-	55	330	55	330
							4	Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Agrowisata/Ekowisata	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Agrowisata/Ekowisata	orang	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							5	Achievement Motivation Training (AMT) Bagi Pelaku Usaha Ekraf	Terlaksananya Achievement Motivation Training (AMT) Bagi Pelaku Usaha Ekraf	orang	-	-	55	128	65	143	0	0	65	168	65	168
							6	Peningkatan kapasitas perupa	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelaku ekraf dan pariwisata berbasis seni dan budaya	orang	60	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							7	Workshop penciptaan karakter lokal	Terlaksananya workshop penciptaan karakter lokal	orang	50	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							8	Pemetaan Usaha Pariwisata	Tersedianya buku direktori usaha pariwisata	buku	-	-	100	93	-	-	-	-	-	-	-	-
							9	Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga Pariwisata	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama lembaga pariwisata	dokumen	-	-	4	353	1	350	1	600	1	413	1	413
							10	Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	orang	-	-	-	-	-	-	-	75	505	75	505	
							11	Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal	Terlaksananya sosialisasi dan sertifikasi pariwisata halal bagi usaha pariwisata	peserta	-	-	-	-	-	200	453	250	566	250	566	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-												Unit Penanggung Jawab	Lokasi	
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
								K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)			
1	2	3	4	5	6	7	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21	
				4	Review Perda RIPKP	Tersedianya review Perda RIPKP	dokumen		-	-	-	-	1	240	-	-	-	-	-	-		
				5	Penghargaan Pariwisata Sumatera Barat	Terlaksananya Apresiasi terhadap Pelaku Usaha Pariwisata Sumatera Barat	kategori lomba		-	-	1	265	1	100	1	900	1	900	1	900		
				6	Pemetaan Potensi Geowisata Sumatera Barat	Terpetakannya potensi Geowisata Sumatera Barat	kali		-	-	1	138							-	-		
				7	Finalisasi Ranperda Pariwisata Halal	Terlaksananya finalisasi Ranperda Pariwisata Halal	kegiatan		-	-	1	182	1	200	-	-	-	-	-	-		
				8	Penyediaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Pariwisata	Terlaksananya revitalisasi rest area ulu aie	destinasi		-	-	1	388	1	2,146	1	4,487	1	2,487	1	2,487		
				9	Penyusunan Travel Pattern Pariwisata Sumatera Barat	Tersusunnya Travel Pattern Pariwisata Sumbar	dokumen		-	-	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-		
				10	Penyusunan Amdal Kawasan Mandeh	Tersusunnya amdal kawasan Mandeh	dokumen		-	-	-	-	1	1,400	-	-	-	-	-	-		
				11	Penyusunan Izin Lingkungan Rest Area Ulu Aie	Tersusunnya izin lingkungan di Rest Area Ulu Aie	dokumen		-	-	-	-	1	410	-	-	-	-	-	-		
				12	Pengembangan Geopark Sumatera Barat	Terlaksananya dukungan untuk proses pengusulan geopark ranah minang menuju UGN dan UGG	Kab/Kota						3	600	3	2,600	3	2,600	3	2,600		
				13	Pengembangan dan Penguatan Desa Wisata di Sumatera Barat	Terlaksananya pendampingan terhadap desa wisata prioritas	desa wisata		-	-	-	-	-	-	1	400	1	300	1	300		